

## **BAB IV**

### **ANALISIS KONDISI TAHUN 2008**

Situasi kehidupan dunia yang semakin terbuka, jarak yang semakin menyempit dan semakin rumitnya pola jaringan hubungan antar individu, pelaku usaha dan antar pemerintahan, membuat Jakarta sebagai salah satu kota besar dunia dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah yang semakin besar dan kompleks. Kompleksitas tersebut menuntut Jakarta untuk terus melakukan perbaikan di berbagai aspek kehidupan.

Salah satu tantangan besar pembangunan Kota Jakarta adalah pada aspek kependudukan yang berimplikasi pada aspek keamanan, ketenteraman dan ketertiban kota; pemerintahan; ekonomi; sosial; serta sarana, prasarana dan lingkungan. Kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban kota Jakarta sejauh ini belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Masalah ini bersifat kompleks dibanding persoalan yang sama di wilayah non-perkotaan. Hal ini terutama karena determinannya saling berkaitan tidak hanya disebabkan oleh persoalan ekonomi, tetapi juga faktor sosio-kultural masyarakat itu sendiri. Dengan kondisi keamanan dan ketertiban yang baik, diyakini akan mampu menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi aktivitas di bidang ekonomi, investasi, serta kehidupan sosial dan kemasyarakatan.

Di bidang pemerintahan salah satu tantangan yang terus mendapat sorotan masyarakat adalah tuntutan adanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dan yang menjunjung tinggi hukum. Di samping itu, masalah pengawasan juga mendapat perhatian masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masih lemahnya sistem audit di lingkungan pemerintahan daerah, kurangnya transparansi publik, belum optimalnya implementasi peraturan perundang-undangan terutama dalam hal pemberantasan KKN dan belum memadainya tenaga profesional di bidang pengawasan.

Kualitas pelayanan publik merupakan tantangan pembangunan yang tidak kalah besarnya. Sampai saat ini persoalannya dirasakan masih belum memuaskan. Kualitas pelayanan masyarakat terutama dalam rangka memperpendek rantai birokrasi, dan pendelegasian kewenangan kepada pemerintahan di wilayah administrasi yang lebih rendah sampai di tingkat Kecamatan (jalan, air, taman, kebersihan, perumahan, penerangan jalan

umum), dan Kelurahan (kebersihan, ketenteraman dan ketertiban lingkungan, serta kesehatan masyarakat) belum sepenuhnya optimal. Pelaksanaan otonomi daerah juga perlu dievaluasi secara terus menerus. Pengelolaan keuangan dan aset daerah juga harus dikelola secara profesional. Berbagai upaya untuk mengatasi tantangan dan masalah tersebut di atas adalah bagian penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Di bidang perekonomian, tantangan yang tidak kalah besarnya adalah perlunya pemantapan perekonomian daerah, peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan penurunan jumlah penduduk miskin. Sejalan dengan ini, tantangan lainnya adalah peningkatan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi, pembinaan dan penataan pedagang kaki lima, peningkatan kualitas dan daya saing industri pariwisata, peningkatan dukungan lembaga keuangan terhadap pengembangan UKM dan Koperasi, serta perlunya penyehatan manajemen usaha daerah (BUMD). Fakta-fakta yang ada mengindikasikan bahwa ekonomi belum tumbuh sesuai dengan harapan. Selama kurun waktu tahun 2002-2006 perekonomian tumbuh rata-rata 5,6 persen, jauh lebih rendah dari masa sebelum krisis yang mampu tumbuh rata-rata 8 persen per tahun. Namun di tahun 2007, diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mampu mencapai 6,4 persen.

Beberapa kendala besar yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di antaranya adalah terjadinya kenaikan harga bahan pokok akibat kenaikan harga BBM dan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS; masalah ketahanan pangan berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi bahan pokok; kurangnya permodalan bagi usaha kecil dan menengah; adanya hambatan nilai-nilai sosial yang masih mewarnai tradisi berusaha masyarakat; rendahnya minat investasi baik dari dalam maupun luar negeri; serta masalah angkatan kerja yang semakin meningkat jumlahnya dan tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang tersedia.

Di bidang sosial, tantangan dan permasalahan yang dihadapi tidak kalah besarnya, seperti belum memadainya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat tidak mampu, ancaman rawan pangan dan wabah penyakit seperti demam berdarah, flu burung dan

beragam jenis penyakit lainnya, rendahnya kualitas pemuda sebagai generasi penerus, serta masih besarnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Masalah lainnya adalah bertambahnya jumlah penduduk akibat arus migrasi masuk, serta meningkatnya jumlah pengangguran.

Tantangan dalam upaya mewujudkan agenda Indonesia yang aman dan damai adalah semakin merenggangnya kohesifitas sosial di tengah masyarakat. Akibat dari ikatan-ikatan sosial yang rendah ini akan berimbas pada mudah terjadinya instabilitas sosial seperti amuk massa, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, melemahnya trust (rasa saling mempercayai), dan berbagai perilaku sosial menyimpang lainnya yang kesemuanya akan berimplikasi pada terhambatnya upaya peningkatan kesejahteraan penduduk.

Di bidang sarana dan prasarana serta lingkungan hidup tantangan utama yang dihadapi di antaranya adalah belum serasinya penataan ruang, belum memadainya ketersediaan sistem transportasi massal, belum optimalnya pemanfaatan pelabuhan, belum memadainya penyediaan tempat tinggal bagi penduduk miskin, belum meratanya penyediaan air bersih yang terjangkau, belum optimalnya pengelolaan sampah dan penanggulangan banjir, memburuknya kualitas udara akibat bertambahnya kendaraan bermotor, penyediaan ruang publik serta revitalisasi pulau-pulau padat dan pengendalian pencemaran di Kepulauan Seribu.

#### **A. Peran dan Fungsi Provinsi DKI Jakarta**

Sebagai ibukota negara dan salah satu kota besar dunia, Kota Jakarta senantiasa dihadapkan pada tantangan dan permasalahan multidimensi yang berat dan kompleks. Hal ini mengharuskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional. Sebagai konsekuensinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat merencanakan pembangunan yang serasi, seimbang dan berkesinambungan.

Fungsi DKI Jakarta adalah sebagai Kota Jasa (Service City), untuk itu, pembangunan harus dapat mendukung fungsi-fungsi pelayanan kota baik untuk kepentingan regional, nasional maupun internasional. Penjabaran sebagai Kota Jasa (Service City) adalah menjadikan DKI Jakarta sebagai: (1)

: Pusat Informasi dan Pelayanan Masyarakat; (2) Pusat Perdagangan dan Distribusi; (3) Pusat Keuangan; (4) Pusat Kebudayaan dan Pariwisata; dan (5) Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan Kota Jakarta memerlukan kerjasama dari semua pihak seperti keterlibatan Pemerintah Pusat, Dunia Usaha dan Masyarakat agar tercipta kerangka perencanaan pembangunan yang terintegrasi, bersinergi, berkesinambungan, dan efektif.

Terkait dengan hal tersebut, tindak lanjut yang harus dilaksanakan terutama berhubungan dengan kapasitas perangkat daerah untuk mewujudkan rencana pembangunan yang telah ditetapkan, tanpa mengabaikan hambatan-hambatan yang ada. Untuk itu ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian. Salah satu diantaranya adalah peningkatan intensitas pengawasan eksternal. Dengan peningkatan intensitas ini tentu saja menuntut aparatur daerah untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan ketelitian, perbaikan sistem dan prosedur dengan memperpendek jalur birokrasi.

Disamping itu dengan keluarnya berbagai peraturan perundangan yang baru menuntut perangkat daerah untuk secara cepat dan tepat memahaminya, dengan demikian dapat mengantisipasi dengan baik masa transisi perubahan peraturan perundangan tersebut. Konsolidasi internal juga merupakan prioritas yang harus dilakukan untuk terbangunnya berbagai efisiensi. Ini terkait erat dengan adanya tuntutan pemerintah yang bersih dan berwibawa, akuntabel dan menjunjung tinggi hukum. Untuk itu perlu adanya peningkatan kualitas SDM dari perangkat daerah. Peningkatan kualitas dapat berupa peningkatan pendidikan sesuai dengan bidang dari perangkat daerah, juga dapat berupa perbaikan moral perangkat daerah. Yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kesejahteraan, agar dapat menekan keinginan untuk menyalahgunakan kekuasaan demi memperkaya diri sendiri.

## **B. Prospek Ekonomi**

Berbagai upaya untuk mendorong investasi dan ekspor termasuk dengan meningkatkan koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, akan meningkatkan peranan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dalam tahun 2008, perekonomian Jakarta diperkirakan tumbuh 6,9 persen,

lebih tinggi dibandingkan perkiraan tahun 2007 (6,4 persen pada APBD Perubahan 2007). Pendapatan per kapita pada tahun 2008 dalam harga berlaku diperkirakan meningkat menjadi Rp 75,65 juta.

Dari sisi pengeluaran, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang dan jasa diperkirakan tumbuh masing-masing sebesar 5,7 persen dan 16,5 persen. Sementara dari sisi produksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan tumbuh 7,4 persen dan sektor tersier lainnya seperti pengangkutan dan komunikasi; serta keuangan dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa masing-masing tumbuh sebesar 14,4 persen; 5,3 persen; dan 6,3 persen. Adapun sektor industri pengolahan dan sektor bangunan tumbuh masing-masing 4,9 persen dan 7,4 persen.

Inflasi di tahun 2008 diharapkan tetap dapat ditekan di bawah dua digit, atau berkisar pada angka 6,25 persen, lebih rendah daripada perkiraan akhir tahun 2007 sebesar 6,5 persen. Meskipun pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan tarif beberapa ruas tol, namun diprediksikan tidak berdampak signifikan pada kenaikan harga komoditas karena dapat ditekan melalui upaya peningkatan produksi dan efisiensi sistem distribusi.

Inflasi sebesar 6,25 persen dan pertumbuhan ekonomi yang positif diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor riil terutama sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan dan jasa sebagai pilar utama perekonomian Jakarta. Pertumbuhan sektor riil diharapkan mampu menyerap sebagian besar angkatan kerja baru di DKI Jakarta pada gilirannya akan membantu mengurangi angka pengangguran. Disamping mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak, pertumbuhan sektor riil diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor.

Selanjutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan Upah Minimum Provinsi agar tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non-UMP mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan

didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Pada tahun 2008 diperkirakan angka pengangguran mencapai 11,9 persen. Prospek ekonomi yang membaik membuat adanya optimisme yang tinggi sehingga diperkirakan angka pengangguran turun. Diharapkan, kondisi itu akan berdampak pada semakin menurunnya jumlah penduduk miskin yang diperkirakan mencapai 4,5 persen pada tahun 2008.

Meskipun secara statistik persentase penduduk miskin di Jakarta masih di bawah tingkat kemiskinan nasional, namun jumlah kapitanya masih tetap besar seiring pertambahan jumlah penduduk. Nilai persentase ini relatif sama dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2006 dan 2007 jumlah penduduk miskin di Jakarta berkisar 407.000 jiwa, sedangkan pada tahun 2008 diperkirakan sedikit menurun menjadi 405.700 jiwa. Besarnya jumlah penduduk miskin ini relatif membawa beberapa masalah sosial antara lain kriminalitas.

Sebagian besar penduduk Jakarta merupakan usia produktif, yaitu 82,71 persen. Jumlah penduduk yang bekerja tahun 2006 mencapai 3,53 juta orang, terdiri atas laki-laki 2,39 juta orang dan perempuan 1,14 juta orang. Menurut lapangan pekerjaan, kegiatan ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah bidang perdagangan dan jasa (78,4 persen) dan industri pengolahan, dan bangunan (20,3 persen). Sebagai sebuah kota metropolitan sektor tersier yaitu sangat signifikan.

Namun demikian, krisis ekonomi dan migrasi penduduk dari desa ke kota menyebabkan banyaknya penduduk kota bekerja pada sektor informal, terutama pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang meningkat dengan sangat pesat dan keterbatasan daya tampung ruang yang tersedia di pasar atau pusat perbelanjaan, menyebabkan pedagang kaki lima mengambil tempat di emperan toko, trotoar, badan jalan atau di berbagai fasilitas umum lainnya. Keberadaan mereka di tempat yang tidak semestinya telah mengganggu kepentingan dan ketertiban umum dan seringkali menimbulkan masalah-masalah sosial baru, seperti gangguan terhadap lalu lintas, sampah

yang tidak terkendali, perlawanan terhadap upaya penertiban, dan meningkatnya kriminalitas.

### **C. Prospek Sosial Politik Tahun 2008**

Gambaran keadaan sosial di Jakarta dapat dilihat dari jumlah penduduk, ketenagakerjaan, parameter demografi, dan aspek pendidikan. Aspek kependudukan merupakan salah satu tantangan terbesar pemerintah DKI Jakarta. Dengan wilayah yang relatif sempit namun Kota Jakarta menjadi kota tujuan dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia untuk mengadu nasib mencari penghidupan yang diharapkan lebih baik. Kenyataan yang mereka hadapi jauh dari yang diharapkan, memaksa para pendatang tanpa keahlian mencari nafkah dengan jalan apapun demi untuk menjaga kelangsungan hidup. Mereka tinggal di tempat-tempat yang seharusnya tidak layak sebagai tempat tinggal, sehingga rela tinggal di tempat-tempat kumuh. Dimana-mana dengan mudah dijumpai lingkungan kumuh, terutama di sepanjang bantaran sungai, rel kereta api, dan kolong-kolong jembatan. Mereka juga bekerja apa saja misalnya sebagai pengemis, pengamen, preman, termasuk menjadi pencuri, penjambret, perampok, dan sebagainya. Di sisi lain jalan-jalan di Jakarta tidak pernah sepi dari padatnya kendaraan bermotor, yang menyebabkan terjadinya kemacetan yang berkepanjangan. Pada akhirnya kondisi ini berimplikasi pada berbagai aspek menjadikan Jakarta sebagai kota yang rawan dari segi keamanan, ketertiban, dan ketentraman.

Selain variabel-variabel yang mempengaruhi kepadatan penduduk seperti yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa variabel yang tidak langsung mempengaruhi kepadatan penduduk DKI Jakarta. Salah satu variabel lepas adalah variabel jumlah komuter yang setiap harinya turut berpengaruh pada kepadatan penduduk DKI Jakarta terutama pada siang hari. Para komuter ini kebanyakan merupakan para penduduk wilayah administrasi lain di sekitar DKI Jakarta seperti Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok, dan lain-lain yang melakukan aktifitas sehari-hari di wilayah DKI Jakarta dengan pola perjalanan ulang alik antara daerah asalnya dan DKI Jakarta. Dari data yang ada diperkirakan jumlah komuter yang beraktifitas di DKI Jakarta setiap harinya adalah sekitar 1.200.000 jiwa/hari. Dengan demikian apabila variabel komuter, sebagai variabel yang cukup signifikan ini

disertakan dalam perhitungan kepadatan penduduk DKI Jakarta, maka kepadatan penduduk DKI Jakarta adalah sekitar 15.400 jiwa/km<sup>2</sup>.

Dengan memperhatikan berbagai variabel seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan migrasi, diproyeksikan penduduk Jakarta pada tahun 2008 akan mencapai sekitar 8,87 juta orang, naik dari sekitar 8,81 juta orang pada tahun 2007. Diperkirakan yang besar pengaruhnya adalah migrasi masuk. Biasanya migrasi masuk kota Jakarta sangat tinggi sesaat setelah hari Lebaran. Penduduk lama membawa serta teman, kerabat, dan sanak familinya untuk bekerja di Jakarta. Dengan memperhatikan keadaan tersebut, pada tahun 2008 diperkirakan terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja menjadi 4,44 juta orang. Tahun 2007 kondisi Februari jumlah angkatan kerja mencapai 4,09 juta, berarti diperkirakan ada kenaikan sekitar 35 ribu angkatan kerja. Diantara sekian banyak angkatan kerja, di tahun 2008 diperkirakan angka pengangguran mencapai 11,90 persen. Angka ini turun dibandingkan angka tahun 2006 yang mencapai 14,31 persen dan tahun 2007 mencapai 13,27 persen. Prospek ekonomi yang membaik membuat adanya optimisme yang tinggi sehingga diperkirakan angka pengangguran turun. Selain itu diharapkan juga ada penurunan jumlah penduduk miskin dari sekitar 407 ribu orang menjadi 405,7 ribu orang pada tahun 2008

Berdasarkan data Podes 2005, berbagai tindak kriminal terjadi di Jakarta. Tindak kriminal yang paling sering terjadi di banyak kelurahan adalah pencurian dan kasus narkoba. Selama periode 2004-2005, kasus pencurian terjadi di 168 kelurahan (62,92 persen), sedangkan kasus narkoba terjadi di 93 kelurahan (34,83 persen). Kasus lain yang juga cukup menonjol adalah perampokan (36 kelurahan), penganiayaan/kekerasan (24 kelurahan), dan pembunuhan (24 kelurahan). Pada periode yang sama, juga terjadi perkelahian massal di 12 kelurahan, dengan korban jiwa sebanyak 2 orang meninggal dan 28 orang luka-luka. Perkelahian massal yang sering terjadi adalah perkelahian antar kelompok warga (8 kelurahan). Perkelahian massal lainnya adalah perkelahian antar pelajar (3 kelurahan) dan perkelahian antar suku. Nampaknya heterogenitas penduduk yang tinggi menjadi penyebab terjadi perkelahian massal.

Suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2007 memberikan landasan yang kokoh bagi tercapainya kestabilan kondisi politik dan keamanan di tahun 2008 yang menjadi barometer tidak hanya bagi masyarakat dalam negeri namun juga luar negeri, karena tidak lepas dari status Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara.

Meski demikian, Jakarta tetap cenderung memiliki intensitas kerawanan sosial yang relatif tinggi. Hal ini terkait dengan tingginya heterogenitas penduduk dimana pola-pola budaya dan nilai-nilai yang berkembang cenderung masih dalam fase transisional yaitu dari pola budaya Bonding ( yang mengikat rasa kesukuan suatu kelompok suku atau golongan yang tinggi) ke pola budaya yang bersifat lebih terbuka, toleran dan dengan semangat altruistik yang tinggi (bridging). Berbagai prolematika sosial di DKI Jakarta juga cenderung masih rawan seperti adanya tingkat pengangguran, kriminalitas, kemiskinan, dan kepadatan penduduk. Dalam situasi ini, dan dengan Modal Sosial yang masih relatif lemah, jika ada ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam akan menyebabkan mudahnya terjadi anarkisme dan kerusuhan massal.

Suhu politik Jakarta diperkirakan akan kembali menghangat sekitar akhir tahun 2008 dengan akan dilaksanakannya pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2009. Oleh karena itu Jakarta yang ditengarai mempunyai potensi kerawanan sosial yang tinggi perlu lebih waspada menghadapi Pilpres tahun 2009. Perlu kesadaran bersama dan kerjasama berbagai pihak serta dengan semangat toleransi yang kuat guna terus ditumbuhkan untuk tidak saja demi suksesnya Pilpres tersebut, tetapi juga demi terbangunnya semangat kohesifitas sosial yang kuat di tengah kehidupan sosial masyarakat Jakarta. Karenaya, dituntut langkah-langkah antisipasi dari pemerintah, dan juga partisipasi yang nyata dari warga. Kesadaran yang tinggi akan arti demokrasi, kebebasan, toleransi, semangat kekeluargaan, gotong royong, dan persaudaraan perlu ditumbuhkan dengan melakukan berbagai penyuluhan, penerangan, dan pemberdayaan sosial kepada warga Jakarta.

Dari aspek kependudukan, parameter demografi seperti Angka Kelahiran Total (TFR) dan Angka Kematian Bayi (IMR) sudah menunjukkan kestabilan. Pada tahun 2008 TFR diperkirakan sebesar 1,52 per wanita. Ini

berarti sepanjang usia reproduksinya wanita Jakarta akan melahirkan 1 atau 2 anak saja. Di tahun-tahun mendatang, TFR diperkirakan tidak jauh berbeda angkanya. Selanjutnya angka kematian bayi di tahun 2008 dan 2009 diperkirakan menurun hingga 13 bayi pada setiap 1000 kelahiran, dari 14 bayi pada setiap 1000 kelahiran pada tahun 2006. Sejalan dengan menurunnya IMR, Angka Harapan Hidup penduduk Jakarta semakin tinggi. Pada tahun 2008 Angka Harapan Hidup diperkirakan mencapai 74,42 tahun, dan untuk selanjutnya kecenderungan Angka Harapan Hidup terus makin tinggi dengan percepatan yang rendah.

Di bidang pendidikan penduduk Jakarta terus mengalami kemajuan. Indikatornya adalah rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan angka partisipasi sekolah. Pada tahun 2008 dan 2009 diperkirakan rata-rata lama sekolah penduduk Jakarta telah mencapai 11,56 dan 11,77 tahun, naik dari proyeksi tahun 2007 yang mencapai 11,16 tahun. Ini berarti sebagian besar penduduk hampir menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas. Kecenderungan rata-rata lama sekolah akan terus naik sejalan dengan tuntutan keadaan dan usaha pemerintah Jakarta untuk terus meningkatkan kualitas kesejahteraan warganya. Indikator lainnya adalah angka melek huruf. Dengan kecenderungan yang terus meningkat, diperkirakan hampir seluruh penduduk Jakarta yaitu **sekitar 99,68 persen** pada tahun 2008 telah terbebas dari buta huruf. Hal ini juga merupakan bagian dari peningkatan kualitas warga Kota Jakarta.

**Angka partisipasi sekolah diproyeksikan terus mengalami peningkatan, terutama pada jenjang sekolah dasar dan menengah pertama, sejalan dengan dilaksanakannya program wajib belajar 9 tahun. Pada tahun 2008, 98,63 persen anak-anak usia 7-12 diproyeksikan sudah dapat menikmati jenjang Sekolah Dasar. Program untuk mendukung upaya ini melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berupa pembebasan SPP bahkan sekolah gratis sudah dilaksanakan sejak tahun 2006. Demikian pula untuk jenjang sekolah menengah pertama yaitu anak usia 13-15 tahun, angka partisipasinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 diperkirakan 90,75 persen anak usia ini sudah dapat menikmati jenjang Sekolah Menengah Pertama. Sementara untuk jenjang Sekolah Menengah Atas atau untuk anak usia 16-18 tahun angka partisipasi sekolahnya belum setinggi jenjang yang di bawahnya.**

Pada tahun 2008 diperkirakan angka partisipasi sekolah anak usia ini baru mencapai 63,54 persen, namun dengan kecenderungan yang terus diusahakan meningkat diperkirakan pada tahun 2009 mencapai 65,17 persen.

#### **D. Kondisi Lingkungan Hidup**

Disaster yang didefinisikan sebagai suatu situasi, baik lingkungan alam maupun lingkungan buatan, yang menyebabkan bahaya bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungannya, perlu mendapat perhatian dengan melakukan berbagai tindakan antisipatif. Ada beberapa jenis bencana alam yang saat ini sangat mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat (social vulnerability) Indonesia, termasuk masyarakat DKI Jakarta. Pertama adalah Banjir.

Menurut data dari hasil Podes 2005, untuk seluruh Indonesia dari 69.957 desa di Indonesia, sebanyak 14.569 desa, atau sekitar 21 persen, mengalami bencana Banjir dan Banjir Bandang. Angka ini meningkat dibandingkan tiga tahun yang lalu, 2002, yaitu sebanyak 12 205 desa. Ancaman bencana jenis ini terutama dialami oleh Sumatera dan Jawa ( 4.974 desa di Sumatera dan 4.455 desa di Jawa). Kalimantan dan Sulawesi juga mulai dominan (yaitu 1.987 desa di Kalimantan dan 1.940 desa di Sulawesi). Fakta ini menunjukkan bahwa Banjir telah menjelma menjadi ancaman yang semakin meluas di seluruh wilayah Indonesia.

Di DKI Jakarta, menurut data hasil pendataan Podes 2005, banyaknya kelurahan yang terkena musibah banjir selama priode 2002-2005 sebanyak 167 kelurahan (dari total 267 kelurahan). Angka ini jauh meningkat dibanding priode sebelumnya (2000-2002) yaitu sebanyak 88 kelurahan. Ini merupakan indikasi kuat bahwa kejadian bencana banjir kian tahun kian meluas dan mengawatirkan. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah terjadi dua kali banjir besar melanda Jakarta yaitu tahun 2002 dan Februari 2007 yang melumpuhkan sebagian besar aktivitas warga dan menyebabkan kerugian materi yang besar. Banjir tahun 2007 setidaknya melanda 97 kelurahan dengan ketinggian air bervariasi dari 30 centimeter hingga 4 meter, dan menyebabkan lebih dari 52.000 warga Jakarta mengungsi

Bencana alam lainnya yang kini menjadi salah satu ancaman utama, yang semakin hari semakin meluas adalah Gempa Bumi. Hasil dari

Pendataan Podes 2005 menunjukkan bahwa 6621 desa di Indonesia mengalaminya. Tidak hanya provinsi NAD dan Sumatera Utara, tetapi sekitar 9 provinsi lainnya juga terus diguncang gempa yaitu Sumatera Barat, Bengkulu, NTT, Papua, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Banten, Jokjakarta dan Jawa Timur. Sebagaimana diketahui, kepulauan Indonesia berada pada daerah seismik yang paling aktif di dunia, karena berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng India-Australia, lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia.

Untuk DKI Jakarta, walau belum diperoleh angka yang relatif akurat, tetapi kejadian gempa juga kerap terjadi. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir masyarakat Jakarta diresahkan oleh beberapa kejadian guncangan gempa yang walaupun tidak menelan korban jiwa, tetapi cukup membuat sebagian masyarakat panik. Secara geografis Jakarta berada di sekitar daerah subduksi yang berpotensi menyebabkan gempa, seperti yang pernah terjadi tahun 1900. Gempa juga mungkin disebabkan oleh adanya patahan (faults) di bawah metropolitan Jakarta. Meskipun belum pernah tercatat kejadian gempa luar biasa di Jakarta dan sekitarnya, namun tidak dapat disimpulkan Jakarta menjadi wilayah yang aman gempa dikarenakan pembentukan metropolitan Jakarta relatif baru, sehingga pencatatan kejadian gempa belum menyeluruh. Namun demikian, mengingat fungsi strategis Jakarta sebagai ibukota negara dan berpenduduk banyak sehingga berpotensi menimbulkan korban yang besar, dan rendahnya kesiapan penduduk serta aparat dalam mengatasi bencana alam, maka secara keseluruhan Jakarta dikategorikan memiliki resiko besar terhadap bencana gempa.

Selain bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan beragam jenis bencana alam lainnya, bencana buatan manusia seperti kebakaran juga terus menghantui Jakarta. Data yang juga bersumber dari hasil Podes 2005 menunjukkan bahwa sekitar 101 kelurahan di DKI Jakarta mengalami kejadian kebakaran. Ini membuktikan bahwa permasalahannya tidak kecil yang berpotensi besar mendatangkan kerugian harta, benda dan jiwa masyarakat Jakarta.

Di samping itu perlu juga dipikirkan tentang konsumsi air tanah yang sangat tinggi dan terus menerus, terkait dengan intrusi air laut. Berdasarkan

hasil Susenas 2005, dari 2.454.518 rumah tangga yang ada di DKI Jakarta, sebanyak 1.151.220 rumah tangga atau 46,9 persen sudah mengkonsumsi air minum dari sumber air leding. Sedangkan 832.655 rumah tangga (33,9 persen) masih bergantung pada air sumur/pompa. Situasi ini akan cukup membahayakan bagi DKI Jakarta. Dengan banyaknya rumah tangga dan juga perkantoran yang mengkonsumsi air minum yang bersumber dari air tanah, akan menyebabkan intrusi air laut yang semakin meluas dan membahayakan bagi kelangsungan penyediaan air bersih maupun bagi keamanan bangunan yang ada. Di sisi lain penggunaan air tanah untuk air minum perlu memperhatikan pencemaran yang terjadi, karena sekitar 23,22 persen kelurahan yang ada di Jakarta mengalami pencemaran air dan 6,74 persen kelurahan mengalami pencemaran tanah.

Sementara itu pencemaran udara yang terjadi di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan berbagai pihak. Di 38 kelurahan (14,23 persen) terjadi pencemaran udara. Dapat diduga bahwa pencemaran udara tersebut berasal dari asap ribuan kendaraan bermotor yang berlalu lalang di Jakarta. Selain itu bisa juga berasal dari bau tumpukan sampah yang menumpuk. Jika dilihat dari tempat pembuangan sampah, 256 kelurahan (95,88 persen) membuang sampah di tempatnya kemudian diangkut ke tempat penampungan, sedangkan 11 kelurahan (4,12 persen) masih dibuang ke lubang kemudian dibakar. Kendaraan bermotor yang menyebabkan adanya pencemaran udara juga menjadi penyebab adanya pencemaran suara di 49 kelurahan (18,35 persen).

Wabah penyakit juga terus menghantui penduduk DKI Jakarta. Menurut hasil pendataan Podes 2005, sekitar 65 kelurahan melaporkan adanya wabah penyakit Muntaber yang menyerang kelurahan mereka. Terdapat sebanyak 203 kelurahan yang menyatakan wabah penyakit Demam Berdarah menelan korban di kelurahan mereka. Angka-angka yang disebutkan ini cukup mencengangkan sekaligus mengindikasikan betapa meluasnya wabah penyakit yang mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat DKI Jakarta. Belum lagi dengan ancaman penyakit flu burung yang kian mewabah. Data yang diperoleh hingga Agustus 2007, jumlah kasus flu burung di Jakarta sebanyak 25 orang dan 22 orang diantaranya meninggal (Komnas FBPI, 2007). Ini sinyal bahaya yang perlu

mendapat perhatian terutama di tahun 2008 yang diduga polanya masih belum akan berubah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan perkotaan serta pencemaran air dan tanah kota juga disebabkan oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah. Sumber limbah padat di wilayah DKI Jakarta umumnya berasal dari kegiatan rumah tangga, pasar, industri, komersial, taman, jalan dan sungai. Berdasarkan data yang ada pada Tahun 2005 produksi sampah di wilayah DKI Jakarta sekitar 26.264 m<sup>3</sup> per harinya. Produksi sampah yang ada sekitar 95% dapat terangkut, sedangkan sisanya belum tertangani.

Untuk komponen limbah padat yang berasal dari MCK, baik dari rumah tangga domestik, maupun perusahaan dan fasilitas umum, cara penanganan dan pengelolannya sebagian besar dengan menggunakan metode pengelolaan septic tank. Persentase penggunaan septic tank rata-rata berkisar 39 persen dan non septic tank rata-rata 20 persen totalnya 59 persen, dan sisanya dibuang langsung ke saluran kota. Sementara itu saluran buangan air rumah tangga masih menggunakan sistem terbuka dan belum berbentuk perpipaan. Peningkatan pelayanan pengelolaan limbah padat dan cair masih sangat rendah dan lebih banyak menjadi tanggung jawab masyarakat.

Prospek kondisi lingkungan hidup dilihat dari pencemaran, bencana alam dan wabah penyakit di DKI Jakarta pada tahun 2008 memang sulit untuk diprediksi secara tepat. Tetapi dari indikasi yang ada menunjukkan bahwa persoalannya sangat besar dan meluas. Untuk mencegah terjadinya bencana, disadari, tidak mudah. Persoalannya tidak hanya terletak pada Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga terletak pada pola budaya masyarakat yang membutuhkan penyesuaian dengan tuntutan keadaan dan zaman. Untuk meminimalkan dampak destruktifnya, semua pihak saat ini dituntut untuk menguatkan tali ikatan sosial yang ada di masyarakat guna menghidupkan nilai-nilai kebersamaan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alamnya. Perlu tertanam secara kuat di setiap lapisan dan entitas sosial bahwa kemudahan dan keuntungan-keuntungan ekonomi sesaat, seperti penggundulan hutan di daerah Hulu Jakarta (Depok, Bogor dan Cianjur) akan berakibat pada kehancuran yang lebih parah bagi jutaan manusia yang tinggal di wilayah Botabek khususnya di wilayah DKI Jakarta.